

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

PLN Sewa Diesel Atasi Wilayah Krisis

PT PLN (Persero) akan menyewa pembangkit diesel guna mengatasi wilayah-wilayah yang mengalami krisis listrik dalam jangka pendek. Dirut PLN Eddie Widiono di Jakarta, Selasa mengatakan, penyewaan diesel akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka oleh anak perusahaan PLN sendiri yakni PT Kokindo. "Kami diminta pemerintah untuk responsif atasi daerah krisis," katanya. Namun, Eddie mengaku belum menghitung total dana maupun jumlah pembangkit diesel yang dibutuhkan. Hanya saja, PLN menargetkan dapat mengatasi krisis melalui penyewaan diesel tahun ini. Meski diakuinya, menyewa diesel dalam jumlah besar butuh waktu cukup lama seperti pengadaan diesel di Sumut yang bisa mencapai 14 bulan. "Kami akan melakukan upaya agar bisa mempercepat proses penyewaan diesel," katanya. Kendala lainnya, adalah besaran volume BBM dan besaran subsidi listrik yang telah dialokasikan pemerintah buat PLN.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Agency defends nuclear power plant development

The Jakarta Post
Jakarta

The Nuclear Technology Supervisory Agency has defended the government's policy to develop nuclear technology for research, industry and energy on the basis that such technology has been proven safe.

Agency head Sukarman Aminjoyo said that Indonesia has operated three nuclear reactors for several years and no accidents have occurred.

"All forms of technology involve certain risks, but since the early development of our reactors we have surveyed all probabilities. We have even anticipated the possibility of risks associated with potential earthquakes," Sukarman told *The Jakarta Post* on Tuesday.

He said that the safety and security of Indonesia's nuclear reactors had been proven during the earthquake in Yogyakarta last May. The nuclear reactor at the research center there was

unscathed, showing that nuclear energy is safe even in the "ring of fire" if proper design technology is used.

"Regulations oblige us to choose power plant technology that has been proven safe, rather than new, untested technology," he said.

Sukarman also said that many Asian countries frequently affected by earthquakes such as Japan and Korea had long been developing their own nuclear power plants.

"Japan has built more than 50 power plants and South Korea has built more than 20 power plants. Japan is often hit by earthquakes but has avoided nuclear accidents. Why are we so worried about risks we are able to anticipate?" Sukarman asked.

In Indonesia, reactors located in Yogyakarta, Bandung and Serpong, Banten, are being used for research.

Last year President Susilo Bambang Yudhoyono announced government plans to start building a nuclear

power plant in 2010 which will commence operations in 2016. This power plant will be the first nuclear power plant to provide energy to the public and industrial sectors in the country.

Sukarman said that in many countries, nuclear power plants are owned and run by the government as strategic resources, but Indonesia's 2006 Law on Nuclear Reactors allows the private sector to apply for nuclear power plant licenses.

He said the agency, as the controlling body, accepts applications for licenses for the development of nuclear power plants. A national team for the development of reactors decides the criteria for ownership.

"We are responsible for assessing all applications before issuing various licenses, such as for location and construction," Sukarman said.

In an attempt to improve its services to the public, the agency marked its ninth anniversary by opening a one-

stop service center for public and industry licensing.

Besides issuing licenses for nuclear installations, the agency also issues licenses for industry, research and health purposes.

The Director for Radiation and Radioactive Facility Licensing at the agency, Azhar, said the body has issued more than 400 industrial licenses for industries including the paper, steel, wood, cement and cigarette industries.

In the health sector, the agency has issued more than 3,000 licenses for hospitals and health clinics around the country including for cancer therapy at 20 hospitals and nuclear medicine at 12 hospitals.

The agency also issues licenses for non-reactor installation, such as for isotope industry installations and radioactive treatment installations.

Besides issuing licenses, the agency is also responsible for monitoring installations. The agency currently has a limited number of inspectors, but is prioritizing monitoring facilities with a greater potential risk, such as industries in which radioactive materials are used. (02)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

PLN Sewa Diesel Atasi Wilayah Krisis

JAKARTA — PT PLN (Persero) memutuskan akan menyewa sejumlah pembangkit diesel guna mengatasi wilayah-wilayah yang mengalami krisis daya listrik dalam jangka pendek. Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, penyewaan diesel akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka oleh anak perusahaan PLN yakni PT Kokindo.

"Kami telah diminta pemerintah untuk responsif atasi daerah krisis. PLN telah siapkan sejumlah strategi yang di antaranya berupa pengadaan diesel oleh anak perusahaan, Kokindo," katanya di Jakarta, Selasa (8/5).

Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim menambahkan, sejumlah daerah krisis tersebut adalah Sumatra bagian

utara, Sumatra bagian selatan, Kalbar, Kaltim, Sulut, Gorontalo, dan Parigi, Palu. "Kami sudah tetapkan sewa diesel untuk atasi daerah-daerah krisis," katanya.

Namun, Eddie mengaku belum menghitung total dana maupun jumlah pembangkit diesel yang dibutuhkan untuk mengatasi wilayah krisis listrik tersebut. Hanya saja, lanjutnya, PLN menargetkan dapat mengatasi wilayah-wilayah krisis melalui penyewaan diesel pada tahun ini. Meski diakuinya, kalau menyewa diesel dalam jumlah besar maka membutuhkan waktu cukup lama seperti pengadaan diesel di Sumut yang bisa selama 14 bulan. "Kami akan melakukan sejumlah upaya agar bisa mempercepat proses penyewaan dieselnnya," katanya.

Kendala lainnya, lanjutnya, adalah besaran volume BBM dan besaran subsidi listrik yang telah dialokasikan pemerintah buat PLN. Menurut Eddie, sebenarnya PLN telah melakukan sejumlah upaya guna mengatasi wilayah krisis. Namun, pemerintah meminta PLN lebih cepat lagi mengatasi wilayah krisis.

Eddie juga mengatakan, pelibatan Kokindo merupakan upaya PLN mengurangi masalah dalam pengadaan diesel tersebut. "Dengan strategi ini maka masalahnya bisa dikumpulkan di anak perusahaan dan tidak mengganggu kinerja unit bisnis lain," katanya. Sekarang ini, lanjutnya, Kokindo sudah mengoperasikan sejumlah pembangkit berge-rak milik PLN.

Sementara itu dari Gorontalo dilaporkan PLN menja-

min tak akan ada lagi pemadaman listrik secara bergilir di provinsi itu mulai bulan Mei 2007. General Manager PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Sulutenggo), Sigit, mengatakan pada 19 Mei 2007, PLN Gorontalo akan mendapatkan tambahan mesin genset berkapasitas 3 MegaWatt (MW) dari Palu, untuk menutupi kekurangan beban puncak di Gorontalo. "Nanti pada akhir Mei juga akan bertambah 3 MW lagi, sehingga daya mampunya bertambah," kata dia.

Saat ini, PLN Gorontalo hanya memiliki daya mampu sebesar 20,4 MW, sementara beban puncaknya mencapai 24 MW, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman listrik secara bergiliran di sejumlah wilayah di Gorontalo. ■ ant/ria

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI		JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

CAKRAWALA

Jepang Bangun 8 PLTG

■ TOKYO - Perusahaan-perusahaan pembangkit listrik Jepang berencana membangun delapan pusat pembangkit listrik tenaga gas alam cair (PLTG) dalam lima tahun ke depan, guna mengurangi emisi karbon dioksida. Demikian dilaporkan surat kabar bisnis *Nikkei*, Senin (7/5). Empat PLTG merupakan bangunan baru, sementara empat lain merupakan perubahan dari pembangkit listrik yang saat ini menggunakan batu bara atau minyak, kata harian itu. Jika telah beroperasi, emisi karbon dioksida dari PLTG lebih kecil dari pembangkit tenaga lainnya.

Pembangkit listrik lainnya menyumbang setidaknya 30 persen dari seluruh emisi CO2 dan gas rumah kaca di negeri itu. Kandungan karbon gas alam lebih kecil dari jenis energi lainnya. Saat ini, PLTN menyumbang 30 persen dari keseluruhan pembangkit tenaga listrik di Jepang, disusul 26 persen PLTG, 24 persen batu bara, 10 persen bahan bakar minyak dan 9 persen PLTA. (ant)

6

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2007

Pemilihan Langsung PLTU Paiton Salah Prosedur

Jakarta-Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Yogo Pratomo menilai, proses pemilihan langsung pengembangan proyek listrik swasta (IPP) Paiton 3 dan 4 menyalahi prosedur.

Pasalnya, proyek itu hanya melibatkan dua pengembang, PT Paiton Energy (pengembang PLTU Paiton 7 & 8) dan PT Jawa Power (pengembang PLTU Paiton 5 & 6), sementara menurut ketentuan untuk pemilihan langsung minimal diikuti tiga pengembang.

"Tender itu diulang karena tidak sesuai prosedur. Sebaiknya dilakukan pelelangan umum, sehingga semakin banyak perusahaan yang ikut," kata Yogo Pratomo, Senin (7/5).

Ia menjelaskan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 100.K/010/DIR/2004, mengharuskan minimal ada tiga pengembang yang ikut. Oleh karena itu, Yogo menilai ada cacat prosedur.

"Keputusan Direksi ini

merupakan pedoman yang harus diikuti untuk pengadaan barang dan jasa. Keppres 80 menyatakan untuk lingkungan BUMN, pedoman pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan direksi. Kalau tidak, nanti bisa menimbulkan masalah," jelas Yogo.

Lebih lanjut, ia menerangkan pada batas akhir 23 April hanya ada dua pengembang yang memasukkan penawaran harga jual beli tenaga listrik. Sementara PT Jawa Power meminta waktu dua bulan. Padahal proses akan dilanjutkan pada pertengahan Mei 2007. "Artinya, kalau Jawa Power tidak ikut, praktis hanya ada Paiton Energy," ujar Yogo.

Selain itu, tambahnya, Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2006 menyatakan ketentuan mengenai penunjukan langsung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Menurut Yogo, Menteri ESDM belum

mengeluarkan Permen mengenai hal ini.

"Artinya, ketentuan pemilihan langsung belum bisa dilaksanakan, karena belum ada peraturan menteri yang menjadi dasar operasional pelaksanaan tender. Selain itu, tidak ada proses prakualifikasi. Yang diundang hanya dua perusahaan dan tidak ada peraturan operasional. Saya kira, lebih baik dilakukan pelelangan umum," tegas Yogo.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PLN Nasri Sebayang menyatakan, pelaksanaan proses pengadaan pemilihan langsung batal dan harus dilakukan pemilihan langsung ulang dengan mengundang kedua pengembang.

"Kedua pengembang dapat mengajukan penawaran kembali dalam waktu singkat," kata Nasri Sebayang dalam keterangan pers, namun ketika SH kembali menghubungi telepon seluler Nasri, tidak ada jawaban. (ady/ega)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2007

Atasi Krisis Listrik PLN Sewa PLTD

PERLUASAN jaringan listrik ke daerah membuat PT PLN (persero) puyeng. Bukannya apa, pasokan listrik dari pembangkit yang dimiliki faktanya belum mencukupi. Karenanya manajemen memutuskan untuk menyewa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) guna mengatasi krisis listrik di daerah-daerah tertentu.

"Ini dilakukan karena adanya desakan pemerintah agar PLN mempercepat pengentasan daerah krisis listrik di nusantara. PLN diminta lebih responsif mengatasi daerah krisis. Lebih cepat lebih baik sesuai arahan Presiden. Kami sudah berupaya mempercepat, namun hari ini kami diberi tahu untuk lebih mempercepat lagi," tegas Direktur Utama PT PLN Persero Eddie Widiono di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Edie mengakui kalau penyewaan diesel tersebut merupakan solusi PLN untuk jangka pendek. Karena jika menggunakan pembangkit BBM, terkendala jatah BBM dan subsidiya. Sedangkan untuk jangka panjang PLN mengandalkan crash program 10.000 MW.

Untuk menyelesaikan daerah krisis listrik jangka pendek, PLN menunjuk salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Kokindo. Kokindo pula yang akan menggelar tender terbuka untuk penyewaan diesel tersebut. "Dengan strategi ini maka masalahnya bisa dikumpulkan di anak perusahaan dan tidak mengganggu kinerja unit bisnis lain," ujarnya.

Di tempat sama, Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel, beberapa daerah yang masih menderita krisis listrik saat ini adalah Sumatera bagian Utara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Parigi dan Palu. ● IU

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI		JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

DAYA LISTRIK

Atasi Krisis,

PLN Optimalkan Diesel

JAKARTA (Suara Karya): Untuk mengatasi krisis daya listrik di sejumlah daerah yang dinilai rawan, PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) akan mengoptimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Untuk itu, PLN akan melakukan tender pengadaan diesel, sehingga bisa dengan cepat mengatasi krisis listrik di sejumlah daerah tersebut. Ini dilakukan PLN sebagai bagian dari program percepatan untuk mengatasi wilayah-wilayah yang rawan mengalami krisis listrik.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono menjelaskan, pengadaan diesel dibutuhkan untuk mengatasi krisis daya listrik di sejumlah daerah dalam waktu dekat ini. Tentunya akan dilaksanakan melalui mekanisme tender secara terbuka oleh anak perusahaan PLN yaitu PT Kokindo.

"PLN telah diminta pemerintah untuk responsif atasi daerah krisis. PLN telah siapkan sejumlah strategi yang di antaranya berupa pengadaan diesel oleh Kokindo di samping program percepatan yang telah dilakukan dalam jangka panjang, yakni crash program 10.000 megawatt (MW)," kata Eddie saat ditemui wartawan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (8/5).

Namun demikian, Eddie mengaku belum menghitung total dana maupun jumlah diesel yang dibu-

tuhkan untuk mengatasi wilayah krisis listrik tersebut. Hanya saja, lanjutnya, PLN menargetkan dapat mengatasi wilayah-wilayah krisis melalui penyewaan diesel pada tahun ini.

Saat ini, menurut Eddie, kendala dalam menyewa diesel dalam jumlah besar membutuhkan waktu cukup lama, seperti

Pengadaan diesel dibutuhkan untuk mengatasi krisis daya listrik di sejumlah daerah dalam waktu dekat ini.

pengadaan diesel di Sumut yang bisa memakan waktu 14 bulan. "Kami akan melakukan sejumlah upaya agar bisa mempercepat proses penyewaan dieselnnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim menambahkan, sejumlah daerah krisis tersebut adalah Sumatera bagian utara, Su-

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

ATASI KRISIS LISTRIK PLN Tingkatkan Sewa Diesel

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) terpaksa akan menyewa sejumlah pembangkit diesel guna mengatasi krisis daya listrik di sejumlah wilayah di Tanah Air. Keputusan tersebut merupakan alternatif jangka pendek, sebelum pembangkit berbahan bakar batu bara beroperasi secara penuh setelah 2010.

"Kami telah menyiapkan sejumlah strategi, yang di antaranya berupa pengadaan diesel oleh anak perusahaan, PT Kokindo," ujar Direktur Utama PLN Eddie Widiono usai rapat dengan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (8/5).

Namun, Eddie mengaku belum menghitung total dana maupun jumlah pembangkit diesel yang dibutuhkan untuk mengatasi wilayah krisis listrik tersebut. Meski begitu, pihaknya menargetkan bisa mengatasi wilayah-wilayah krisis melalui penyewaan diesel pada tahun ini.

Eddie mengakui, kendala waktu sering menjadi masalah utama dalam pengadaan diesel dalam jumlah besar. Dia mencontohkan pengadaan diesel di wilayah Sumatera Utara membutuhkan waktu hingga 14 bulan. "Tapi ka-

mi akan tetap berupaya agar bisa mempercepat proses penyewaan dieselnnya," katanya.

Kendala lain adalah terbatasnya besaran volume bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan besaran subsidi listrik yang telah dialokasikan pemerintah kepada PLN. Tahun ini misalnya, PLN hanya dijatah solar 8,5 juta kiloliter dan subsidi Rp 25,8 triliun.

Sebenarnya, lanjut Eddie, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mengatasi wilayah krisis listrik. Namun demikian, pemerintah meminta PLN lebih cepat lagi mengatasi wilayah krisis. Mengenai keterlibatan anak perusahaan, kata Eddie, hal itu merupakan upaya perseroan untuk meminimalisasi masalah atau risiko dalam pengadaan diesel tersebut.

"Nantinya, masalah bisa dikumpulkan di anak perusahaan dan tidak mengganggu kinerja unit bisnis lain," katanya.

Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim menambahkan, sejumlah daerah krisis tersebut adalah Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.4

TAHUN 2007

Proyek PLTN terancam molor

JAKARTA: Pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terancam molor dari target pada 2016 menyusul belum ditetapkannya pemilik dan ketidakpastian lokasi pembangunan reaktor.

Kepala Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten) Sukarman Aminjoyo mengatakan pihaknya selaku penerbit izin pembangunan sekaligus pengoperasian PLTN belum memperoleh kepastian siapa pemilik dari PLTN, yang direncanakan di Semenanjung Muria-Jepara itu.

"Kami masih menunggu siapa pemilik PLTN tersebut. Begitu surat permohonan izin dari pemilik masuk, Bapeten nanti akan mengevaluasinya. Kalau memenuhi syarat akan diterima. Sekarang siapa pemiliknya belum tahu," ujarnya se usai memimpin perayaan ulang tahun Bapeten ke-9 di Jakarta, kemarin.

Dengan belum dipastikannya siapa pemilik PLTN, dia memperkirakan pembangunannya akan mengalami pengunduran.

Berdasarkan undang-undang, kata Sukarman, pemilik PLTN bisa merupakan BUMN, swasta, atau instansi pemerintah. Namun, di sebagian besar negara, PLTN dikuasai langsung oleh instansi pemerintah. (BISNIS/RAF)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2007

Tender PLTU 2 Banten Disinyalir Bermasalah

Jakarta-Tender Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Banten berkapasitas 10.000 megawatt (MW) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bernuansa KKN.

Demikian dikemukakan sumber SH, Selasa (8/5). Ia mengatakan beberapa hal yang mengindikasikan praktik tersebut, pertama tentang kapasitas unit pembangkit sebesar 316 MW. Sepengetahuan dia, tidak ada standar kapasitas PLTU batu bara buatan RRC sebesar itu, yang ada 300 MW, 330 MW, dan 350 MW.

"Kapasitas 316 MW merupakan prototipe baru. Sesuai ketentuan dalam dokumen lelang, seharusnya itu tidak bisa diterima karena belum terbukti," kata sumber tadi.

Padahal, sambung dia, PLTU Cilacap dengan kapa-

sitas 2 x 300 MW buatan Dong Fang, kapasitas maksimalnya yang tercapai baru 80 persen atau 240 MW.

"Yang patut dipertanyakan, dalam peresmian pembangunan proyek terpampang tulisan PLTU 2 x 300 MW. Mana yang benar, 316 MW atau sudah dinegosiasi menjadi 300 MW dengan harga 316 MW," ujarnya.

Hal lainnya, harga per KWH disinyalir menjadi lebih mahal disebabkan tidak dipenuhinya persyaratan dalam dokumen lelang.

"Jangan-jangan semua proyek percepatan PLTU 10.000 MW bernasib sama. Itu dinyatakan murah tetapi sebenarnya lebih mahal," katanya.

Sebagai informasi PT PLN (Persero) telah menandatangani kontrak dengan konsorsium Chengda

Engineering untuk PLTU 2 Banten dengan kapasitas 2 x 316 MW dan dengan *Net Plant Heat Rate at MCR based on LHV: 2211 Kcal/KWH.*

Penunjukan pemenang ini dilakukan bersama-sama pemenang lainnya setelah mendapat fatwa dari Kejaksaan Agung, yang membenarkan proses tender pelelangan terbuka meski tidak sesuai atau melanggar Kepres No 80 Tahun 2003, untuk dievaluasi lebih lanjut, biar pun cuma ada satu penawaran yang memenuhi persyaratan.

Menurut sumber tersebut, PT PLN (Persero) ternyata di dalam evaluasi tekniknya juga meluluskan persyaratan yang ditentukan PLN sendiri dalam dokumen lelang, biar pun hal itu menyalahi dokumen lelang.

(danang j murdono)



TARIF MURAH — Vice President Communication & Marketing PT Telkom Edy Kumia (tengah) memberikan keterangan mengenai tarif murah Telkom Flexi, di Jakarta, Selasa (8/5), didampingi Executive General Manager Divre III Bandung Abdul Aziz (kiri) dan Executive General Manager Divre II Jakarta Adeng Achmad. Telkom Flexi adalah produk jasa layanan fixed wireless access (FWA) paling murah dibanding produk sejenis yang mengadopsi teknologi CDMA. Edy Kumia yakin, Telkom Flexi akan mencapai angka 6 juta pelanggan hingga akhir tahun 2007. (Suara Karya/Syamsuri S).

matera bagian selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. "Kemarin, kami sudah tetapkan sewa diesel untuk atasi daerah-daerah krisis," katanya.

Kendala lainnya, lanjut Eddie, yakni besaran volume bahan bakar minyak dan besaran subsidi listrik yang telah dialokasikan pemerintah buat PLN.

Lebih jauh Eddie mengatakan, sebenarnya PLN telah melakukan sejumlah upaya guna mengatasi wilayah krisis daya listrik tersebut. Namun, pemerintah meminta PLN lebih cepat lagi mengatasi wilayah krisis.

Dan terkait keterlibatan Kokindo, lanjut Eddie, sebagai upaya PLN mengurangi masalah dalam pengadaan diesel tersebut. "De-

ngan strategi ini, maka masalahnya bisa dikumpulkan di anak perusahaan dan tidak mengganggu kinerja unit bisnis lain. Apalagi saat ini Kokindo sudah mengoperasikan sejumlah pembangkit bergerak milik PLN di sejumlah wilayah," tutur Eddie.

Sedangkan langkah lain yang dilakukan dalam upaya percepatan mengatasi daerah krisis daya listrik,

Herman Darnel mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pembangunan transmisi listrik yang menghubungkan antar wilayah di luar Jawa-Bali.

"Misalnya, Parigi (Sulteng) telah terinterkoneksi transmisinya dengan Palu (Sulteng), sehingga memungkinkan mengalirkan daya listrik ke daerah yang kekurangan daya tersebut," ujar Herman. (Abdul Choir)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

Pencurian Listrik Banyak Terjadi di Depok

[DEPOK] Masyarakat di Depok banyak melakukan penyambungan listrik secara ilegal. Hal ini dilakukan oleh warga yang tinggal di permukiman dan di kompleks perumahan. Di perumahan misalnya, dari 100 rumah, tiga persennya melakukan penyambungan ilegal. Selain itu, sekitar 50 persen perumahan di Depok masih memasang penerangan umum tanpa rekening.

Kepala PLN Depok, Hadi Suhana kepada SP, Senin (7/5) malam mengatakan, pencurian listrik ini terjadi di Kota Depok, Sawangan, Pancoran Mas, Beji, Margonda, Sukatani, Cibinong, dan Cilangkap. Dia mengungkapkan, pencurian listrik juga terjadi pada Penerangan Jalan Umum (PJU), karena umumnya warga merasa pencurian listrik untuk PJU

tersebut tidak melanggar karena untuk kepentingan publik. "Sikap masyarakat ini terjadi lantaran pemkot belum bisa menyediakan PJU secara luas," ujarnya. Padahal, lanjut Hadi, warga merasa penyediaan PJU merupakan hak mereka sebagai pembayar pajak.

"Warga ingin merasakan langsung dampak pelayanan umum setelah membayar pajak. Namun apa pun alasannya, pemasangan PJU yang tidak dikoordinasikan oleh Pemkot Depok dan tidak terdaftar di PLN adalah ilegal," ujar Hadi.

Hadi menyarankan, pemkot dan warga bersama-sama merencanakan pengadaan sarana PJU untuk dibuatkan jaringannya. [ROB/N-3]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

Tender PLTU Paiton Dinilai Langgar Aturan

[JAKARTA] Proses tender proyek listrik swasta (IPP/Independent Power Project) PLTU Paiton unit 3 dan 4 berkapasitas 800 megawatt (MW) dengan nilai investasi US\$ 800 juta diduga melanggar Perpres 26 tahun 2006. Sebab tidak dilakukan proses prakualifikasi.

"Awalnya, dua perusahaan yang dilibatkan yaitu Paiton Energy dan Jawa Power, padahal seharusnya tiga kontraktor yang ikut. PJB (Pembangkitan Jawa Bali) tidak dilibatkan. PJB adalah anak perusahaan PLN. Entah apa penyebabnya sehingga PJB tidak dilibatkan," kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Tenaga

Listrik Yogo Pratomo, di Jakarta, Senin (7/5).

Dikatakan, jika praktik seperti itu dipelihara, berarti PLN secara terbuka telah merugikan negara. Padahal, dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, negara butuh dana besar untuk memulihkan situasi. Tapi, lanjut dia, kenyataannya hanya Paiton Energy yang dilibatkan secara aktif dan cenderung PLN menunjuk perusahaan itu sebagai pemenang tender. Paiton Energy adalah perusahaan patungan antara Mitsui Jepang dan perusahaan lokal.

Yogo menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah proses pembelian listrik swasta terbagi atas pelelangan umum, penunju-

kan langsung, dan pemilihan langsung. Pembelian listrik swasta Paiton (unit 3 dan 4) seharusnya dilakukan melalui pelelangan umum sesuai Perpres 26/2006 dan Permen ESDM 001/2006. Kebijakan PLN membeli langsung dan menunjuk Paiton Energy sebagai satu-satunya pemenang, kata Yogo, selain berpotensi merugikan keuangan negara, juga melanggar Permen ESDM.

Pembangunan proyek listrik swasta Paiton seharusnya dilakukan melalui tender terbuka agar lebih banyak peserta yang terlibat, akuntabel, dan negara diuntungkan. Menurut dia, jika PJB dilibatkan seluruh peraturan yang disyaratkan dapat terpenuhi. [M-6]